

ADNAN ALBAHRY

**SIMALAKAMA IMPOR  
BERAS**

Diterbitkan secara mandiri  
melalui [Nulisbuku.com](https://nulisbuku.com)

SIMALAKAMA IMPOR BERAS

Oleh: *Adnan Albahry*

Copyright © 2019 by *Adnan Albahry*

**Penerbit**

*Postharvestnotes*

*Postharvestnotes.wordpress.com*

*aalbahry@yahoo.com*

Desain Sampul:

*Tim Nulisbuku*

Diterbitkan melalui:

**[www.nulisbuku.com](http://www.nulisbuku.com)**

## **Ucapan Terimakasih:**

Saya mengucapkan terimakasih kepada banyak teman dan sahabat serta para ahli yang terlibat dalam diskusi mengenai impor beras. Diskusi dilakukan dalam WA group, jalur pribadi, *facebook* atau bertemu tatap muka pada saat isu impor beras ini menjadi begitu kontroversial.

Permasalahan beras bersifat multidimensi sehingga ragam opini dan fakta dari berbagai sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang dan resolusi pandang (mengutip istilah dari Cak Nun) diperlukan untuk mencoba berani memahami permasalahan dan barangkali bisa ikut memikirkan alternatif solusinya.

Pastinya, terimakasih kepada para pembaca budiman yang mau meluangkan waktu untuk membuka lembaran buku ini dan kemungkinan untuk berdiskusi pada masa mendatang.

## DAFTAR ISI

Prolog .....	6
Beras Medium atau Premium? .....	8
Daur Ulang Fitnah: Beras Plastik .....	14
Daur Ulang Isu: Impor Beras .....	19
Harga Beras Indonesia Makin Mahal? .....	26
Big Data Untuk Menganalisa Isu .....	31
Fluktuasi Harga Beras .....	36
Bisakah Kita Tidak Impor Beras? .....	40
Neraca Beras Nasional .....	43
Produksi Beras Nasional .....	46
Behavioral Economics .....	51
Kerangka Sampel Area .....	58
Konversi Lahan dan Umur Petani .....	61
Kepemilikan Lahan .....	68
Subsidi Input Pertanian .....	71

Bahaya Subsidi Output Pertanian .....	75
Kehilangan Potensi Hasil Panen Padi .....	78
Kehilangan Panen dan Pascapanen Beras .....	81
Saluran Pemasaran Beras .....	84
Bangsa Penikmat Beras .....	88
Epilog .....	91



Pada periode Desember 2017-Februari 2018 dunia medsos dan talkshow tv diramaikan oleh isu impor beras. Isu ini menyangkut ke banyak hal, karena beras adalah komoditas politik. Isu beras mudah digoreng untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah bahkan bisa berpotensi untuk menjadi *chaos*.

Informasi yang diperdebatkan menjadi polemik mulai dari berapa data produksi beras sebenarnya, mengapa harus impor sampai tuduhan antek asing-aseng-asong serta pemburu rente untuk persiapan pemilu pada tahun politik 2018-2019.

Padahal, masalah sebenarnya bukan terletak pada keputusan impor atau tidak impor. Keputusan impor atau tidak impor seharusnya hanya keputusan teknis belaka seperti status cadangan beras pemerintah dan pergerakan harga di pasar.

Akar masalah terletak pada banyak hal mulai dari beras dikuasai sebagian besar oleh pedagang pada bagian tengah saluran pemasaran yang bersifat oligopoli bahkan melakukan monopoli, usia petani menua, laju konversi lahan, efektifitas subsidi pupuk dan benih sampai kehilangan pascapanen.

Akar masalah yang jarang dibahas secara terbuka tersebut menyebabkan impor menjadi buah simalakama. Jika impor, pemerintah dituduh tidak becus bekerja menyediakan pangan bagi masyarakat dan antek asing-aseng-asong. Jika tidak impor, harga beras terus melambung naik dan membahayakan jumlah cadangan beras pemerintah.

Buku ini membahas mengenai situasi yang terjadi pada moment tersebut dan kemudian mengeksplorasi dunia perberasan tanah air secara ringkas dan sederhana dari hulu ke hilir untuk memahami permasalahan beras di Indonesia. Pemaparan yang diberikan diharapkan dapat memberikan ide atau solusi bagi para pemangku kepentingan agar situasi buah simalakama pada masa mendatang dapat dihindari.



## **Beras Medium atau Premium?**

Sekitar bulan Juli 2017, heboh pemberitaan media massa mengenai kasus mutu beras menyangkut PT Indo Beras Unggul (IBU) yang merupakan bagian dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food). Ada banyak dimensi dalam perkara tersebut, mulai dari masalah ilmiah, ekonomi, hukum sampai politik. Kasus ini berpangkal dari ketidaksesuaian deskripsi mutu yang tercantum pada label kemasan dengan kondisi fisik beras yang ada di dalam kemasan. Kemudian kasus melebar menjadi dugaan praktek mafia pangan karena praktek jual beli dinilai tidak wajar. Perusahaan membeli gabah petani di atas harga pasar dan menjual beras ke konsumen juga di atas harga rata-rata. Selanjutnya menyangkut ke urusan politik karena salah satu dewan direksi merupakan kader partai politik oposisi pemerintah. Lini massa media sosial cukup ramai saat itu karena kompleksitas masalahnya.



Akhir kisahnya adalah direktur utama nonaktif PT IBU dinyatakan bersalah atas kecurangan bisnis pada label beras dan divonis satu tahun empat bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bekasi[1]. PT TPS Food menutup bisnis berasnya dengan merumahkan 1700 karyawannya[2].

Banyak permasalahan lain yang belum terjawab dari kasus tersebut. Apakah PT IBU bagian dari mafia pangan?; Bagaimana cara kerja mafia pangan? Atau apakah benar-benar ada, apa yang disebut mafia pangan itu?; Apa kriteria orang atau perusahaan bisa dihukum sebagai mafia pangan?; Apakah praktek membeli gabah dari petani di atas harga pasar diperbolehkan?; Apakah petani tidak boleh menikmati harga gabah yang tinggi?; Berapa harga gabah yang wajar, apakah setiap daerah harga harus sama?; Apakah tidak diperbolehkan suatu usaha membeli beras dengan mutu rendah lalu mensortir dan memolesnya sehingga menjadi sesuai kriteria mutu premium?; Dan banyak pertanyaan lain yang sulit untuk diklarifikasi jawabannya.

## TENTANG PENULIS:



**Adnan Albahry.** Penulis lahir dan besar di kota metropolitan Jakarta. Ketertarikannya terhadap dunia pertanian membuatnya mempelajari pertanian secara formal di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Latar belakang pendidikan Agronomi dan Teknologi Pascapanen membantu penulis untuk berkontribusi dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura. Saat ini sedang mengabdikan kepada Negara untuk mengembangkan pertanian di bagian paling timur NKRI. Aktifitas penulis bisa dilihat di website *postharvestnotes.wordpress.com*.